



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA 2024

PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan. Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada..



Jakarta, 23 Januari 2024

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

DAFTAR INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2024

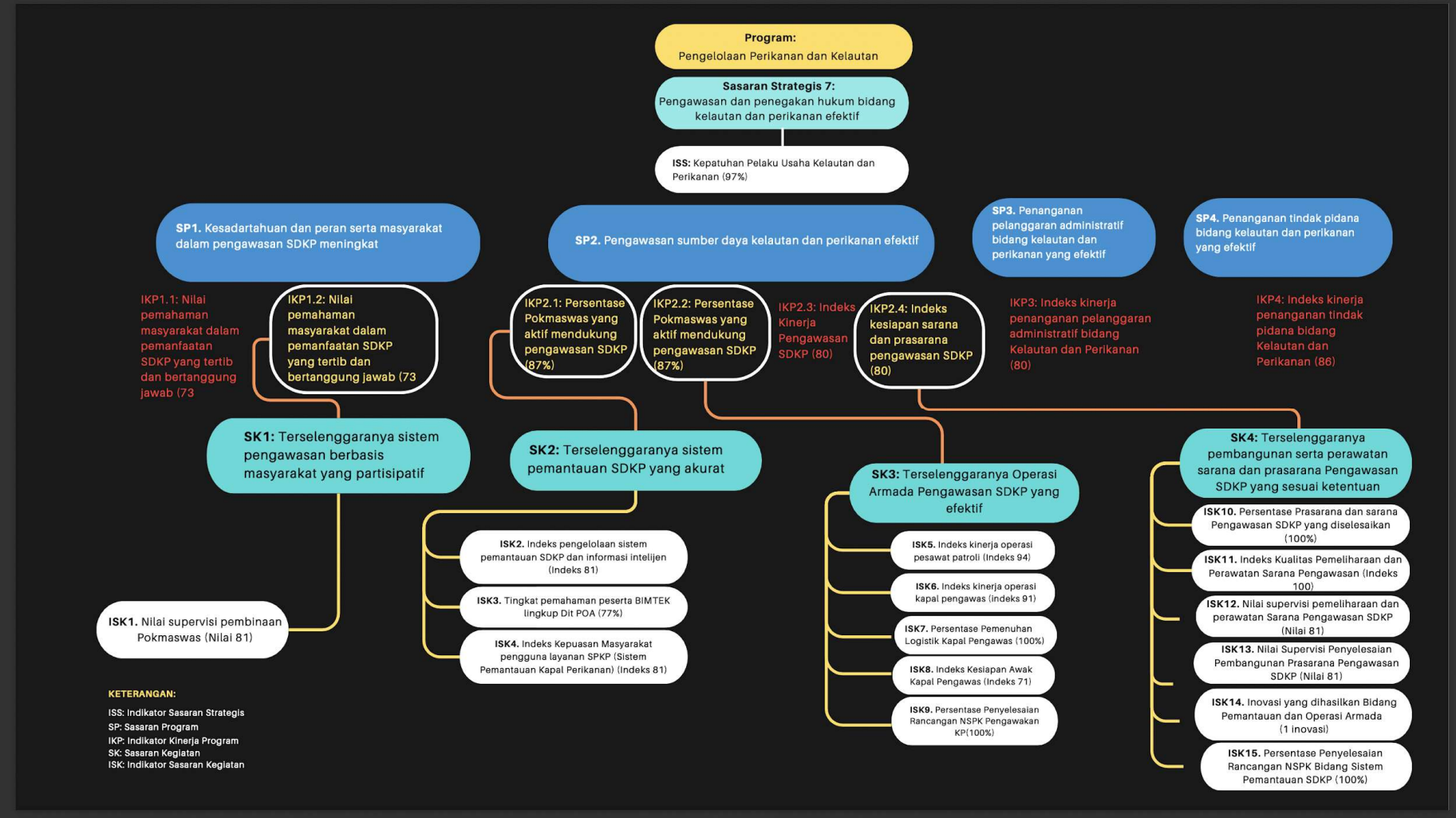
SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	Nilai	81
Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	indeks	81
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	81
	4	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Bidang Pemantauan SDKP (%)	%	80
	5	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	indeks	94
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	6	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	indeks	91
	7	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	100

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
	8	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	79
	9	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	%	100
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	10	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	%	0,5
	11	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	indeks	100
	12	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	81
	13	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	Nilai	81
	14	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	%	100

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
	15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada	Inovasi	1
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	%	100
	17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	Indeks	82
	18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	Nilai	84
	19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	80
	20	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	21
	21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	%	99,4

SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
	22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	%	94
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	%	80
	24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	%	80
	25	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA	Nilai	75
	26	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	Nilai	70

POHON KINERJA
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2024



INDIKATOR KINERJA 1.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;</p> <p>Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat nasionalPendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS oleh DKPSupervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWASMonitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS <p>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional dengan bobot maksimal 20 dibuktikan dengan dokumen terkait kegiatan penilaian;Pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan Pokmaswas oleh DKP dengan bobot maksimal 10 dibuktikan dengan pertemuan dengan DKP baik dengan tatap muka, daring maupun lewat media elektronik;

3. Supervisi terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas dengan bobot maksimal 30 dibuktikan dengan laporan kegiatan supervisi pembinaan Pokmaswas;
4. Monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas dengan bobot maksimal 40 dibuktikan dengan data keaktifan Pokmaswas sesuai dengan form keaktifan Pokmaswas.

Formula:

$$x = a + b + c + d$$

Keterangan:

x: Nilai Supervisi Pembinaan POKMASWAS

a : Pelaksanaan kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional (bobot: 20)

b : Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan (bobot: 10)

c : Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS (bobot: 30)

d : Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS (bobot: 40)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output
		(√) Kualitas/ Mutu
		() Waktu
		() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi
		() Output Kendali Rendah
		() Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA.

- b. Supervisi dilakukan oleh Direktorat POA secara mandiri kepada Dinas KP Provinsi dan UPT lingkup Ditjen PSDKP terkait progress pembinaan yang dilakukan oleh Dinas KP Provinsi dan UPT kepada POKMASWAS.

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Penilaian Pokmaswas Tingkat Nasional b. Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan c. Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP digunakan untuk mengukur kesiapan SPKP dalam menyediakan data pemantauan kapal perikanan.</p> <p>b. Data hasil pemantauan dan informasi intelijen dikelola, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya didistribusikan kepada user sebagai bahan operasi pengawasan SDKP.</p> <p>c. User/pengguna data hasil pemantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan antara lain:</p>			
		(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK
		Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi

Formula:

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^4 f_i$$

Keterangan:

I_{dat} = Indeks Pengelolaan Sistem

n = Jumlah indeks kinerja

i = indeks Pemenuhan

f_i = faktor penghitung

Kriteria Penilaian:		
Nilai Interval	Score	Kriteria
0 - 25	IV	Tidak Siap
26 - 50	III	Siap Terbatas
51 - 80	II	Siap
81 - 100	I	Sangat Siap

Faktor Penghitung

<p>Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 40\%$
<p>Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$

4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET : (√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA. b. Pengelolaan sistem pemantauan SDKP dilakukan untuk memastikan Sistem Pemantauan SDKP operasional secara baik untuk digunakan sebagai sarana pemantau pergerakan kapal perikanan. c. Kendali lebih dominan oleh Internal Direktorat POA.		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Data Vessel Monitoring System (VMS)		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.</p> <p>c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana.</p>

Formula:

$$a = \frac{\sum x.i}{\sum y.i}$$

Keterangan:

a= Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP

xi= Jumlah nilai SKM yang telah dilaksanakan

yi= Jumlah SKM yang telah dilaksanakan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
3,53 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat Baik

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<ol style="list-style-type: none">Pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh faktor eksternal secara dominan.Indikator ini mengukur Kepuasan Masyarakat Pelaku Usaha (pemilik kapal perikanan) atas pelayanan perizinan SPKP, layanan fitur aplikasi, dan aspek manfaat dari penggunaan SPKP.Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara survei kepada para pelaku usaha perikanan (pemilik kapal perikanan).

d. Tercapai atau Tidaknya target IKU sangat bergantung dari hasil survei kepada masyarakat dimaksud (PUAS/TIDAK PUAS).

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Hasil survey kepuasan masyarakat triwulanan
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA.b. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test).c. Peserta dari BIMTEK merupakan stakeholder.d. Stakeholder dalam hal ini adalah Para Pemilik Kapal Perikanan.e. BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2024 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ke stakeholder.f. Apabila terkendala anggaran tidak tersedia, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai.

Formula:

$$n = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

n= Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK

a= Nilai hasil Post Test Peserta BIMTEK

b= Jumlah Peserta

Kriteria Penilaian :

Sangat Paham	76-100
Paham	66-75
Kurang Paham	51-65
Tidak Paham	0-50

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Capaian IKU ini sangat bergantung dari sejauh mana pemahaman peserta Bimtek yaitu Pelaku Usaha/Pemilik Kapal Perikanan terkait konten yang disampaikan.</p> <p>b. Peserta dari Bimtek ini merupakan para pemilik kapal perikanan dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda.</p> <p>c. Tingkat pemahaman sangat dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan peserta Bimtek.</p> <p>d. Pengukuran dilakukan oleh internal Direktorat POA dengan nilai bersumber dari nilai akhir tes pada saat BIMTEK dilaksanakan.</p>
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
13. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara.• Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau;2. Persentase Coverage Area Pengawasan;3. Persentase Capaian Hari Operasi;4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Untuk mengukur Indeks Kinerja Pesawat Patroli menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{pp} = \sum_{i=1}^9 \text{Bobot} (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

C_{ps}	=	Cakupan Pemantauan Pesawat Patroli
D	=	D (<i>distance</i>) adalah jarak aktual pemantauan pesawat patroli berdasarkan aplikasi <i>tracking</i>
R	=	R (<i>range</i>) adalah jangkauan pemantauan berdasarkan penglihatan visual dan kamera pemantauan
n	=	Jumlah periode patroli yang dilaksanakan

Variabel pembentuk perhitungan Indeks Kinerja Pesawat Patroli sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
3. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
4. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
5. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
6. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

Jika pada periode tertentu salah satu komponen perhitungan tidak terdapat target, maka realisasi dianggap tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (20%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Pesawat Patroli secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>Pencapaian IKU ini sangat dominan dipengaruhi dari faktor eksternal seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ketersediaan pesawat (masih sewa). Kita tidak dapat secara leluasa mendapatkan pesawat lain, mengingat spesifikasi yang dibutuhkan dalam operasi pemantauan udara memiliki kekhususan, seperti: adanya camera yang tertanam di pesawat untuk kebutuhan identifikasi objek (foto udara/perekaman). ○ Cuaca, faktor cuaca tentunya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Beroperasi atau tidaknya pesawat sangat dipengaruhi faktor cuaca. Hal ini merupakan alasan yang tidak boleh diabaikan yaitu berkaitan dengan Keselamatan. ○ Izin Terbang, perizinan berkaitan lalu lintas udara yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan <i>security clearance</i> yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pesawat pada saat akan terbang. Terkadang izin terbang ini butuh waktu yang lebih lama, karena butuh <i>diapprove</i> oleh pejabat berwenang, juga kadang terjadi antrian. Sehingga tentunya berpotensi menghambat rencana operasi. Untuk penerbangan terjadwal tentunya dapat diantisipasi dari jauh hari, akan tetapi dalam operasi pesawat patroli seringkali perubahan terjadi dengan cepat, karena adanya Target Operasi (TO) yang harus segera dilakukan validasi faktual (Photo udara / perekaman) dan hasilnya harus segera dikirim ke Nakhoda Kapal Pengawas untuk ditindaklanjuti. ○ Dengan adanya kerentanan sebagaimana dijelaskan di atas, sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasi pesawat dan tentunya berpengaruh terhadap pencapaian IKU "persentase cakupan pemantauan pesawat patroli WPPNRI"..
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Pesawat Patroli Udara 2023		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:• Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;• Cakupan wilayah pengawasan;• Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;• Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{kp} = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%

-
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target tersebut diatas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	a. IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas (8 unit yang dioperasikan oleh Direktorat POA). b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2023
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.</p> <p>Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu Direktorat POA dan UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan.</p> <p>Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; danPemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan. <p>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas dan Berita Acara Akhir Bulan setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :<ul style="list-style-type: none">Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas ke Pertamina dengan tujuan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk bagian dari Pemenuhan BBM Kapal Pengawas;

-
- Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
 - Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Bahan Makanan/Natura, Rekapitulasi Pemenuhan Bahan Makanan/Natura, Dokumentasi Pemenuhan Bahan Makanan/ Natura (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Air Bersih, Rekapitulasi Pemenuhan Air Bersih, Dokumentasi Pemenuhan Pemenuhan Air Bersih (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Rekapitulasi Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen
-

pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

Formula:

$$\mathbf{Xp} = (30\% \cdot x_a) + (20\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c) + (15\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e) + (5\% \cdot x_f)$$

Keterangan:

X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)

X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)

X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)

X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)

X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)

X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

Penjelasan Bobot:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat dominan.</p> <p>Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM.</p> <p>Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.</p>		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas). b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas. c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura. d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih. e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer. f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api. 		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PAN dan RB No. 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP.Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA.

Formula:

$$ika = (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c) + (10\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e)$$

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pendidikan AKP}}{\text{Target Pendidikan AKP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}}{\text{Target Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}} \times 100$$

$$xe = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}}{\text{Target Pemeriksaan kesehatan (MCU)AKP}} \times 100$$

Bobot Pengukuran Capaian:

- 1) Pendidikan (Bobot **50%**)
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%)

Penjelasan Bobot:

- 1) Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

Keterangan:

ika : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

x_a : Pemenuhan Pendidikan

x_b : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

x_c : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut
 x_d : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)
 x_e : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

Kriteria Penilaian :

80 - 100	Sangat Siap
60 - 80	Siap
0 - 60	Tidak Siap

1) Pendidikan (Bobot 35%)

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- a. Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum;
- b. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- c. Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1/ D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;
- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;
- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

No	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :
BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi
BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.	1	Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi

Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah $4/6 = 0,666$ (dibulatkan jadi 0,67).

4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 15%)

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan *Medical Check UP* (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

Medical Check UP (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan
Nama AKP	1	0

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 15%)

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi	
	Memiliki	Belum Memiliki
Nama AKP	1	0

AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA. Bersumber dari data kesiapan AKP : Pendidikan, Sertifikat Keahlian Pelaut, Sertifikat Keterampilan Pelaut, Pemeriksaan Kesehatan (MCU), dan Kartu Ijin Pinjam Pakai Senjata Api.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

9. SUMBER DATA	:	a. E Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata API
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat

2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat POA
8. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup pengawakan, logistik dan operasi armada
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Sarana pengawasan SDKP yang dimaksud adalah dapat berupa kapal pengawas atau sarana pengawasan lainnya.

Pengadaan sarana pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas atau sarana pengawasan lainnya sesuai dengan PERMEN KP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, yang sumber pembiayaannya juga telah diatur dalam PERMEN KP Nomor 4/2021, baik secara *Single Year/kontrak* satu tahun anggaran atau *Multi Years Contract/kontrak* tahun jamak. Persentase sarana pengawasan SDKP dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

1. Untuk skema Non-PHLN *Single Year*

Formula:

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right)$$

Keterangan:

P_{sp} = Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

$\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)

b = Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

2. Untuk skema PHLN *Multi Years Contract*

Tahun Pertama

- *Loan Agreement* ditandatangani/sudah ada, bobot persentase sebesar 5%

Tahun Pertama + 1 tahun

- Pembangunan konstruksi kapal

Formula:

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right) \times 95\%$$

Keterangan:

- P_{sp} = Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
 $\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)
b = Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)
95% = bobot pembangunan konstruksi (%)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana Pengawasan yang diadakan;</p> <p>b. Capaian Indikator dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas atau Pihak terkait yang dapat menentukan besarnya progres berdasarkan prestasi kerja galangan.</p> <p>c. Kapal Pengawas yang diadakan memenuhi peraturan konvensi internasional dan aturan nasional.</p> <p>d. Adanya <i>Loan agreement</i> yang telah ditandatangani untuk pembiayaan secara PHLN.</p> <p>Apabila dalam pelaksanaan pembangunan sarana pengawasan SDKP ini mengalami blokir anggaran/<i>Automatic Adjustment</i> (AA) dan <i>Loan Agreement</i> PHLN yang belum juga ditandatangani dalam jangka waktu tertentu atau belum adanya kejelasan, maka tidak dilakukan penilaian atau target telah terpenuhi.</p>

8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	<i>Loan Agreement</i> , Laporan konsultan pengawas atau pihak terkait yang dapat menentukan besarnya progres pekerjaan, <i>building certificate</i> hanya untuk kapal pengawas yang telah 100% selesai		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)

**3. DESKRIPSI INDIKATOR
KINERJA**

- :
- Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai hasil pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sehingga dapat dinyatakan Laik Operasional.
 - Pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil survey yang menyatakan sarana pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Laik Operasional atau Tidak Laik Operasional.
 - Sarana Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebanyak 12 unit terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 5 (lima) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV.
 - Aspek yang diperhitungkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi:
 - 1) Aspek Konstruksi Kapal
 - 2) Aspek Navigasi dan Komunikasi
 - 3) Aspek Permesinan dan Kelistrikan
 - 4) Aspek Keselamatan dan Pemadam Kebakaran
 - 5) Aspek Tambat Labuh

Formula:

$$L = \Sigma(Akk) + (Ank) + (Akp) + (Atl)$$

Keterangan:

L = Laik Operasional

Akk = Memenuhi Aspek konstruksi kapal (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Ank = Memenuhi Aspek navigasi dan komunikasi (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Akp = Memenuhi Aspek keselamatan dan pemadam (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Apk = Memenuhi Aspek permesinan dan kelistrikan (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Atl = Memenuhi Aspek tambat labuh (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Kriteria		
Laik	:	Nilai =5
Tidak Laik	:	Nilai <5

FORM IDENTIFIKASI INDEKS KUALITAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

4 PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

4.1 PEMERIKSAAN KONDISI LAMBUNG & KONSTRUKSI

C = Coating V = Visual M = Maintenance

No	Item	C	V	M	Findings	Remarks
1.	Lambung diatas garis air	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	⬇️ -
2.	Buritan / Transom	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	⬇️ -
3.	Fore Castle Deck	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	⬇️ -
4.	Tank Top	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum cat dalam kondisi cukup dan plat bordes pada tank top kapal dalam kondisi baik.	⬇️ -
5.	Top Deck	3	3	2	⬇️ Diperiksa secara umum cat dalam kondisi cukup baik, plat pada top deck terdapat beberapa plat kondisi cukup baik.	⬇️ -
6.	Bridge Deck	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum kondisi cat pada bridge deck baik	⬇️ -
7.	Lower Deck	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum kondisi cat dan plat baik dan visual ruangan baik	⬇️ -
8.	Main Deck	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum kondisi cat dan plat baik, Lantai kayu baik dan visual ruangan baik	⬇️ -
9.	Penandaan Nama	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara umum kondisi visual baik dan Nama kapal,	⬇️ -

4.5 PEMERIKSAAN KONDISI SISTEM PERMESINAN KAPAL

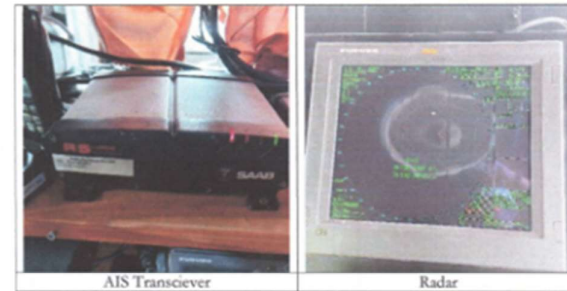
V = Visual F= Function M = Maintenance

No	Item	V	F	M	Findings	Remarks									
1.	Main engine Merk: Cummins Diesel Type: QSK 60M Cap: 250Hp, 1800 rpm Jml: 2 Unit	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara visual kondisi mesin dalam keadaan baik. ⬇️ Pressure gauge dan indicator mesin berfungsi normal ⬇️ Running hour ME Kanan 13202 ⬇️ Running hour ME Kiri 12298	⬇️ -									
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>PS</td> <td>SB</td> </tr> <tr> <td>Serial No.</td> <td>33175106</td> <td>33175127</td> </tr> <tr> <td>Running Hour</td> <td>12298</td> <td>13202</td> </tr> </table>		PS	SB	Serial No.	33175106	33175127	Running Hour	12298	13202					
	PS	SB													
Serial No.	33175106	33175127													
Running Hour	12298	13202													
2.	Gear box Merk: ZF Type: ZF 2050 Ratio: -	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara visual kondisi Gear box dalam keadaan baik. ⬇️ Gear Box berfungsi dengan baik	⬇️ -									
3.	Generator Mesin Bantu Merk: Cummins Type: 6BTA Cap: 124 Bhp, 91 KW Jml: 2 Unit	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara visual kondisi mesin dalam keadaan baik. ⬇️ Pressure gauge dan indicator mesin berfungsi normal ⬇️ Running hour AE Kanan 3879 ⬇️ Running hour AE Kiri 3975	⬇️ -									
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>No. 1</td> <td>No. 2</td> </tr> <tr> <td>Serial No.</td> <td>21893131</td> <td>21893084</td> </tr> <tr> <td>Running Hour</td> <td>3879</td> <td>3975</td> </tr> </table>		No. 1	No. 2	Serial No.	21893131	21893084	Running Hour	3879	3975					
	No. 1	No. 2													
Serial No.	21893131	21893084													
Running Hour	3879	3975													
4.	Alternator Mesin Bantu Merk: Cummins Type: 6B-CP80DM5	3	3	3	⬇️ Diperiksa secara visual kondisi alternator mesin bantu PS & SB	⬇️ -									

4.7 PEMERIKSAAN KONDISI PERALATAN NAVIGASI DAN KOMUNIKASI

V = Visual F = Function M = Maintenance

No	Item	V	F / M	Findings	Remarks
1.	Radars	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi cukup baik dan berfungsi normal ✚ Diperiksa kondisi montior pada peralatan dalam kondisi cukup baik, kondisi monitor dalam kondisi buram 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperlukan perawatan kembali pada monitor peralatan
2.	Master Gyro Compass and Repeaters	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
3.	Public Addresser	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi tidak dapat difungsikan 	-
4.	Standart Magnetic Compass	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
5.	Auto Pilot	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi tidak dapat difungsikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperlukan perbaikan pada peralatan
6.	Rudder Indicators	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi. 	-
7.	Echo Sounder	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
8.	Speed Log	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-



4.8 PEMERIKSAAN KONDISI PERALATAN KESELAMATAN & PEMADAM

V = Visual F = Function M = Maintenance

No	Item	V	F / M	Findings	Remarks
1.	Liferaft Appearance	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
2.	Liferaft Launching Device (HRU)	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
3.	Lifebuoy	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
4.	Lifebuoy With Line	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
5.	Lifebuoy With Line and Light	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
6.	Lifebuoy With Line, Light, Smoke Signal (Mob)	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
7.	Bouyant Apparatus	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh penilaian pihak eksternal yaitu Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai badan usaha milik negara Indonesia yang diberi wewenang untuk mengklasifikasi kapal berbendera Indonesia untuk memberikan penilaian mengenai kelaiklautan kapal untuk berlayar.</p> <p>b. Biro Klasifikasi Indonesia adalah Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.</p>
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Survey Biro Klasifikasi IndonesiaIndek
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1) a. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan target nilai 81.2) b. Supervisi dilaksanakan secara mandiri melalui penilaian langsung dan/atau tidak langsung (apabila tidak memungkinkan) ke lokasi kapal pengawas dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kesiapan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan hasil supervisi dituangkan dalam sebuah laporan.3) c. Sarana Pengawasan SDKP UPT Ditjen PSDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 5 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas V sebanyak 64 unit (<i>Speedboat</i>).4) d. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP terbagi menjadi dua, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas II dan III dan (bobot nilai 70%),2. Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas IV dan V (bobot nilai 30 %).

Formula:

$$Ns = (70\% \cdot s_a) + (30\% \cdot s_b)$$

Keterangan:

Ns = Nilai *supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP*

Sa = Nilai *Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas II dan III*

Sb = Nilai *Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas IV dan V*

Kriteria Capaian :

Siap	≥ 75
Tidak Siap	< 75

DAFTAR KAPAL PENGAWAS UPT DITJEN PSDKP 2023

Nc	Nama Speedboat	Penempatan	UPT Ditjen PSDKP
1	Napoleon 036	Satwas PSDKP Sibolga	Pangkalan PSDKP Lampulo
2	Napoleon 045	Pangkalan PSDKP Lampulo	
3	Dolphin STBL 01	Bengkulu	
4	Dolphin 08	Satwas PSDKP Belitung	Pangkalan PSDKP Batam
5	Dolphin 015	Satwas PSDKP Tj. Balai Karimun	
6	Dolphin 018	Satwas PSDKP Tj. Pinang	
7	Dolphin 023	Satwas PSDKP Tj. Jabung Barat	
8	Dolphin 024	Wilker PSDKP Moro	
9	Napoleon 015	Satwas PSDKP Palembang	
10	Napoleon 016	Satwas PSDKP Natuna	
11	Napoleon 027	Satwas PSDKP Kep. Anambas	
12	Napoleon 035	Satwas PSDKP Bangka	
13	HIU BIRU 01	BATAM	
14	HIU BIRU 02	BATAM	
15	Dolphin 04	Satwas PSDKP Serang	Pangkalan PSDKP Jakarta
16	Napoleon 06	Pangkalan PSDKP Cirebon	
17	Napoleon 014	Satwas PSDKP Pesawaran	
18	Napoleon 052	Satwas PSDKP Palabuhan Ratu	
19	HIU BIRU 03	JAKARTA	Pangkalan PSDKP Bitung
20	Dolphin 03	Wilker PSDKP Banggai Kepulauan	
21	Dolphin 019	Satwas PSDKP Kendari	
22	Dolphin 026	Satwas PSDKP Gorontalo Utara (Kwandang)	
23	Napoleon 030	Satwas PSDKP Makassar	
24	Napoleon 031	Satwas PSDKP Gorontalo	
25	Napoleon 056	Satwas PSDKP Mamuju	
26	Abacore 01	Pangkalan PSDKP Bitung	
27	Hiu Bru 05	Pangkalan PSDKP Bitung	
28	Marlin 03	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap
29	Marlin 09	Satwas PSDKP Pati	
30	Dolphin 029	Satwas PSDKP Pekalongan	
31	Napoleon 12	Satwas Sadeng	
32	Napoleon 033	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Belawan
33	Napoleon 034	Satwas PSDKP Trenggalek (Prigi)	
34	Dolphin 014	Satwas PSDKP Tj. Balai Asahan	
35	Napoleon 028	Stasiun PSDKP Belawan	
36	Napoleon 054	Stasiun PSDKP Kupang	Stasiun PSDKP Kupang
37	HIU BIRU 04	KUPANG	
38	Napoleon 03	Satwas PSDKP Kayong Utara	Stasiun PSDKP Pontianak
39	Napoleon 037	Stasiun PSDKP Pontianak	
40	Napoleon 038	Satwas PSDKP Sambas	
41	TB 01		Stasiun PSDKP Tarakan
42	Marlin 05	Satwas PSDKP Kotabaru	
43	Marlin 07	Satwas PSDKP Banjarmasin	
44	Dolphin 017	Satwas PSDKP Balikpapan	
45	Abacore 03	Stasiun PSDKP Tarakan	Stasiun PSDKP Tahuna
46	Napoleon 017	Stasiun PSDKP Tahuna (Melonguane)	
47	Napoleon 039	Stasiun PSDKP Tahuna (Dago)	
48	Napoleon 040	Satwas PSDKP Halmahera Selatan	Stasiun PSDKP Ambon
49	TENGGIRI (8M)		
50	Napoleon 051	Satwas PSDKP Seram Bag. Barat	
51	Napoleon 055	Satwas PSDKP Morotai	Stasiun PSDKP Biak
52	Dolphin 016	Satwas PSDKP Jayapura	
53	Napoleon 041	Stasiun PSDKP Biak	
54	Dolphin 028	Satwas PSDKP Banyuwangi	
55	Napoleon 07	Pangkalan PSDKP Benoa	Pangkalan PSDKP Tual
56	Napoleon 023	Satwas PSDKP Lombok Timur	
57	Napoleon 053	Satwas PSDKP Probolinggo	
58	Marlin 014	Satwas PSDKP Mimika (Timika) fak2	
59	Napoleon 018	Satwas PSDKP Sorong	
60	Napoleon 025	Satwas PSDKP Mimika	
61	Napoleon 042	Wilker PSDKP Raja Ampat	
62	Napoleon 049	Wilker PSDKP Warabal	
63	Napoleon 050	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat	
64	Abacore 02	Pangkalan PSDKP Tual	

No	Nama Kapal Pengawas	Penempatan	UPT Ditjen PSDKP
1	Hiu 12	Pangkalan SDKP Lampulo	Pangkalan PSDKP Lampulo
2	Hiu 03	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam
3	Hiu 17	Pangkalan PSDKP Batam	
4	Hiu Macan 03	Pangkalan PSDKP Batam	
5	Hiu 06	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pangkalan PSDKP Jakarta
6	Hiu 10	Pangkalan PSDKP Jakarta	
7	Hiu 02	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung
8	Hiu 05	Pangkalan PSDKP Bitung	
9	Hiu 04	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap
10	Hiu 01	Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan
11	Hiu 08	Stasiun PSDKP Belawan	
12	Hiu 16	Stasiun PSDKP Belawan	
13	Hiu Macan 03	Stasiun PSDKP Kupang	Stasiun PSDKP Kupang
14	Hiu Macan 01	Stasiun PSDKP Pontianak	Stasiun PSDKP Pontianak
15	Hiu 11	Stasiun PSDKP Pontianak	
16	Hiu 07	Stasiun PSDKP Tarakan	Stasiun PSDKP Tarakan
17	Hiu 15	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna
18	Hiu 13	Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon
19	Hiu Macan 04	Stasiun PSDKP Biak	Stasiun PSDKP Biak
20	Hiu 14	Pangkalan PSDKP Tual	Pangkalan PSDKP Tual
21	Hiu Macan 06	Pangkalan PSDKP Tual	
22	Hiu 09	Pangkalan PSDKP Benoa	Pangkalan PSDKP Benoa

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Pencapaian IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat POA bersumber dari hasil jumlah supervisi terhadap penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP yang terdiri dari Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 5 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas V sebanyak 64 unit (<i>Speedboat</i>), sehingga tingkat validitas IKU ini termasuk kategori Output Kendali Tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Laporan Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP;</p> <p>Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi.</p> <p>Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan.</p> <p>Prasarana pengawasan yang disupervisi adalah Prasarana Pengawasan Utama tidak termasuk bangunan untuk Kampung Nelayan Modern (KALAMO)</p> <p>Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana pengawasan SDKP.</p> <p>Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> <p>Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, <i>shop drawing</i>, jadwal kerja/kurva S, <i>as built drawing</i>.</p>

Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.

Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki target nilai 81.

- a. Variabel penilaian supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP, yaitu:
- perencanaan teknis (bobot 40);
 - pelaksanaan konstruksi (bobot 40);
 - pengawasan konstruksi (bobot 20).

Formula:

$$\sum_{nsp4}^{\square} = \frac{A1 + A2 + A3 + \dots \dots An}{n}$$

$$A1 \dots An : (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

$\sum_{nsp4}^{\square} =$: Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$A_1 \dots A_n$: Nilai supervisi penyelesaian pembangunan setiap unit prasarana pengawasan SDKP

x_a : Nilai supervisi perencanaan teknis penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_b : Nilai supervisi pelaksanaan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_c : Nilai supervisi pengawasan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

n : Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang dibangun

Kriteria Capaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Penjelasan Bobot:

NO	Jenis Dokumen	Dokumen	Nilai (%)	Bobot
1	Perencanaan Teknis	Gambar Teknis	10	40
		Rincian Anggaran Biaya (RAB)	10	
		Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKSS)	10	
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	10	
2	Pembangunan Kosntruksi	Shop drawing (Gambar Kerja Awal)	10	40
		Kurva S (Jadwal Pembangunan Project)	10	
		Laporan (Kontraktor)	10	
		Asbuilt Drawing (Gambar Kerja Akhir)	10	
3	Pengawasan Pembangunan	Laporan Mingguan	10	20
		Laporan Bulanan	10	

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	<p>a. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada bersumber dari kegiatan supervisi penilaian terhadap kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana SDKP di UPT Ditjen PSDKP.</p> <p>b. Supervisi penilaian terhadap kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana SDKP ini dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.</p> <p>c. Sehingga, validitas IKU ini output kendali tinggi.</p> <p>d. Apabila pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.</p>
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan supervisi penilaian penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 2. Dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 3. Dokumen pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 4. Dokumen pengawasan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP.
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
13. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan (√) Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. • Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. • Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat

2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat POA
8. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup prasarana dan sarana
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p> <p>Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, dan berkelanjutan</p> <p>Kelompok inovasi: umum, khusus</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)</p> <p>Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan</p> <p>Pengukuran Capaian:</p>

Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Inovasi
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan capaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Tim Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, sehingga validitas IK yang dipilih Output Kendali Tinggi
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;● Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:● Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)● Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:● Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)● Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)

- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
 - Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, sehingga validitas IK yang dipilih Output Kendali Tinggi
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru

13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.</p> <p>Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB</p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dengan menggunakan LKE, pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri lingkup Direktorat POA
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

14. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2022 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA, capaian secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Direktorat POA
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir

12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20.

)

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja			
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan capaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.			
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada			
9. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023• Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.
Formula:		
$f = \frac{x}{y} \times 100\%$		
Keterangan:		
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(√) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat POA dan pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.			
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada			
9. SUMBER DATA	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA			
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf● UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Coofish)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan Aplikasi Coofishb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.

- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.**
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat.**
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Sekretariat Ditjen PSDKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Aplikasi Coofish
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

9. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
9. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
10. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data

11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;• Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP
		Formula : 1. Dihitung dari jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB/Tim Penilai Internal KKP 2. Target merupakan akumulasi dari tahun 2018.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.		
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada		
9. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP		
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 26.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>b. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;• Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Formula Perhitungan

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur oleh Inspektorat Jenderal KKP akan tetapi dalam pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat POA, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali rendah.
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

9. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



**Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2023**